



# Risalah Kebijakan

• • • • Nomor 6, September 2022



## Belajar melalui Refleksi Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka: Seberapa Siap Satuan Pendidikan Melakukan Perubahan?



### Ringkasan

Kesiapan satuan pendidikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum baru ini. Untuk itu, Kemendikbudristek menyediakan instrumen refleksi kesiapan satuan pendidikan sebagai perangkat asesmen mandiri yang diisi oleh kepala sekolah untuk mengetahui level kesiapan mereka yang menjadi salah satu dasar melakukan perubahan kategori implementasi kurikulum apabila diperlukan. Kesiapan satuan pendidikan dilihat melalui beberapa indikator, antara lain pemahaman terhadap panduan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum, penyediaan buku teks, akses terhadap sumber-sumber belajar mandiri, dan aktivitas komunitas belajar.

Analisis terhadap hasil isian instrumen refleksi kesiapan dapat bermanfaat bagi Kemendikbudristek untuk mendorong kesiapan satuan pendidikan dan perbaikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian satuan pendidikan belum memahami secara utuh panduan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum, belum menyediakan buku teks sesuai rasio kebutuhan siswa, belum mengikuti topik-topik kunci yang disediakan melalui Platform Merdeka Mengajar, dan belum sepenuhnya menyaksikan seri webinar yang ditayangkan. Di sisi lain, sebagian besar satuan pendidikan telah tergabung dalam komunitas belajar, sehingga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Risalah kebijakan ini merekomendasikan agar pemerintah dapat melakukan penguatan pemahaman terkait perencanaan dan pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka, memastikan satuan pendidikan dapat memenuhi rasio kebutuhan buku Kurikulum Merdeka, memfokuskan pemanfaatan PMM dan seri webinar pada topik-topik yang diperlukan untuk implementasi Kurikulum Merdeka, dan memberi perhatian terhadap daerah yang belum banyak memiliki komunitas belajar yang aktif dan mendukung penerapan kurikulum. Refleksi berkala juga diperlukan untuk memastikan penerapan Kurikulum berjalan baik dan persoalan di lapangan dapat segera diatasi.

## Konteks

Berbagai studi terkait ketertinggalan dan kesenjangan pembelajaran (*learning loss* dan *learning gap*) memberikan rekomendasi pentingnya melakukan penyesuaian kurikulum agar lebih adaptif dan fleksibel menyesuaikan dengan kondisi peserta didik sehingga pemulihan pembelajaran dapat dilakukan (Engzell, et al, 2021; Jandric & McLaren, 2021; Li, et al, 2021). Di Indonesia, upaya pemulihan pembelajaran mulai dilakukan lebih intensif sejak pandemi COVID-19 terjadi, salah satunya melalui kurikulum darurat (kurikulum dalam kondisi khusus). Setelah hampir satu tahun pelaksananya, hasil evaluasi menunjukkan penggunaan kurikulum darurat secara signifikan mampu mengurangi indikasi *learning loss* selama pandemi, baik untuk capaian literasi maupun numerasi (Tim Penyusun Pusat Penelitian Kebijakan & INOVASI, 2021).

Dampak positif dari penerapan kurikulum darurat terhadap pembelajaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka diluncurkan pada program Merdeka Belajar episode 15, di mana Mendikbudristek Nadiem Anwar Makariem menyampaikan bahwa dalam rangka pemulihan pembelajaran, satuan pendidikan diberikan kebebasan memilih kurikulum yang akan diterapkan, yakni Kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum darurat (K-13 yang disederhanakan), dan Kurikulum Merdeka (Paparan Mendikbudristek dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode 15, tanggal 11 Februari 2022). Apabila satuan pendidikan memilih opsi Kurikulum Merdeka, maka kepala satuan pendidikan diberikan kesempatan untuk mempelajari kurikulum ini dan mendaftar melalui laman <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id>. Sebelumnya, Kurikulum Merdeka yang dikenal sebagai Kurikulum Prototipe mulai diterapkan pada 2021 kepada pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan (SMK PK).

Satuan pendidikan diberikan tiga pilihan kategori dalam Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Pada Mandiri Belajar, satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Pada Mandiri Berubah, satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka dan menggunakan perangkat ajar yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Sedangkan Mandiri Berbagi, satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar yang diperlukan. Hingga 30 April 2022, terdapat sejumlah 142.663 satuan pendidikan dari 510 kabupaten/kota yang mendaftar untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, dengan rincian 52.369 Mandiri Belajar, 86.405 Mandiri Berubah, dan 3.889 Mandiri Berbagi.

Animo satuan pendidikan yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka cukup besar, yakni sekitar 43,93% dari jumlah satuan pendidikan secara nasional. Jumlah ini cukup menggembirakan di satu sisi karena menunjukkan minat sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka sangat tinggi. Namun di sisi lain, tantangan utamanya adalah memastikan Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan dengan baik oleh satuan pendidikan.

Prinsip penerapan Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan, sehingga pendaftaran dan upaya persiapan untuk melakukan implementasi Kurikulum Merdeka menjadi otonomi satuan pendidikan (Anggreana, dkk., 2022a). Untuk mendukung implementasi tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi dan dukungan, seperti penyediaan sumber belajar yang dapat diakses secara terbuka, misalnya Platform Merdeka Mengajar (PMM), seri webinar Kurikulum Merdeka, mendorong aktivasi komunitas belajar di sekolah dan antarsekolah, serta menyediakan pusat layanan bantuan (*helpdesk*). Artinya, penerapan Kurikulum Merdeka memerlukan upaya sekolah untuk mempelajari materi Kurikulum Merdeka secara mandiri dan melakukan penyesuaian pembelajaran.

Namun, upaya satuan pendidikan untuk belajar secara mandiri melalui PMM masih minim. Hingga 14 Juni 2022, sebagian besar sekolah yang mendaftar implementasi Kurikulum Merdeka (sekitar 56,67%) belum melakukan login di Platform Merdeka Mengajar (PMM), sekitar 31,34%

sekolah sudah melakukan login di PMM tetapi belum mulai belajar secara mandiri, dan hanya sekitar 11,99% yang sekolah sudah login dan mulai belajar secara mandiri (Paparasi Perkembangan PMM, 14 Juni 2022). Selain itu, *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) pada Juni 2022 menemukan adanya kepala satuan pendidikan yang merasa level kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang dipilih ketika pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di satuan pendidikan mereka. Data ini menjadi sinyal awal bahwa kesiapan Sebagian sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka masih minim.

Minimnya persiapan yang dilakukan satuan pendidikan memiliki korelasi dengan belum maksimalnya sosialisasi baik oleh dinas pendidikan maupun oleh unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbudristek di daerah. Hal ini terangkum dari hasil survei yang dilakukan PSKP di bulan Maret 2022, di mana hasilnya menunjukkan sejumlah 49,17% kepala sekolah menyatakan dinas pendidikan belum melakukan sosialisasi. Begitu pun dengan UPT Kemendikbudristek, di mana terdapat sejumlah 48,77% kepala sekolah menyatakan bahwa UPT belum melakukan sosialisasi. Dinas pendidikan dan UPT Kemendikbudristek yang berada di wilayah Jawa-Bali adalah yang paling banyak melakukan sosialisasi dibandingkan wilayah lainnya (PSKP, 2022a). Di sisi lain, satuan pendidikan juga belum betul-betul memahami kebutuhan implementasi Kurikulum Merdeka, salah satunya tergambar melalui minimnya pengetahuan kepala sekolah mengenai buku Kurikulum Merdeka. Survei yang dilakukan PSKP menunjukkan, terdapat sekitar 56,7% kepala sekolah tidak mengetahui kebutuhan buku teks yang akan digunakan untuk Kurikulum Merdeka (PSKP, 2022b).

Berdasarkan berbagai pertimbangan terkait persiapan satuan pendidikan, Kemendikbudristek kemudian mengambil kebijakan memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk merefleksikan kembali kesiapan mereka untuk menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran baru 2022/2023 yang dimulai pada pertengahan Juli 2022. Untuk itu, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyediakan instrumen refleksi kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka. Dalam instrumen refleksi, kesiapan satuan pendidikan dilihat melalui beberapa aspek, antara lain: a) pemahaman terhadap panduan implementasi Kurikulum Merdeka; b) penyediaan buku teks Kurikulum Merdeka; c) pemanfaatan dukungan belajar secara mandiri (Platform Merdeka Mengajar dan seri webinar Kurikulum Merdeka); dan d) aktivitas komunitas belajar guru.

Pengisian instrumen refleksi dilakukan pada 29 Juni – 5 Juli 2022 melalui asesmen mandiri (*self assessment*) oleh kepala satuan pendidikan pendaftar IKM di semua jenjang pendidikan melalui laman <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/>. Terdapat sekitar 32.557 satuan pendidikan yang telah mengisi instrumen refleksi atau sekitar 23% dari seluruh satuan pendidikan yang mendaftarkan IKM. Risalah kebijakan ini menyajikan analisis dan rekomendasi dari isian instrumen refleksi tersebut.

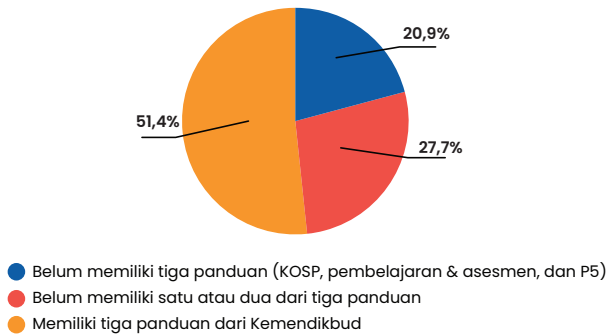
### **Simpulan #1: Sebagian besar satuan pendidikan belum memahami panduan implementasi Kurikulum Merdeka yang disediakan oleh Kemendikbudristek.**

Salah satu karakteristik dari kebijakan publik yang baik adalah kebijakan tersebut terinformasikan dan dapat dipahami oleh masyarakat (Dunn, 2003). Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman kepala satuan pendidikan perihal implementasi Kurikulum Merdeka menjadi hal mendasar untuk digali dalam refleksi kesiapan ini.

Hasil refleksi kesiapan menunjukkan, lebih dari setengah kepala satuan pendidikan pendaftar implementasi Kurikulum Merdeka telah memiliki tiga panduan implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan* (KOSP), *Panduan Pembelajaran dan Asesmen*, dan *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (P5) (Grafik 1). Ketiga panduan tersebut umumnya diperoleh melalui laman <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/>. Menurut studi PSKP sebelumnya pada Maret 2022,

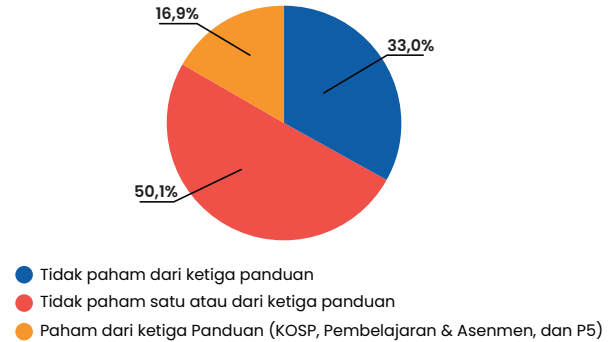
berbagai media daring menjadi sumber informasi dominan bagi sekolah untuk mengakses Kurikulum Merdeka (PSKP, 2022).

**Pendidikan Memiliki Panduan KOSP, Pembelajaran dan Asesmen, dan P5 dari Kemendikbudristek (n=32.557)**



**Grafik 1** Satuan Pendidikan memiliki Panduan KOSP, Pembelajaran dan Asesmen, dan P5 dari Kemendikbudristek

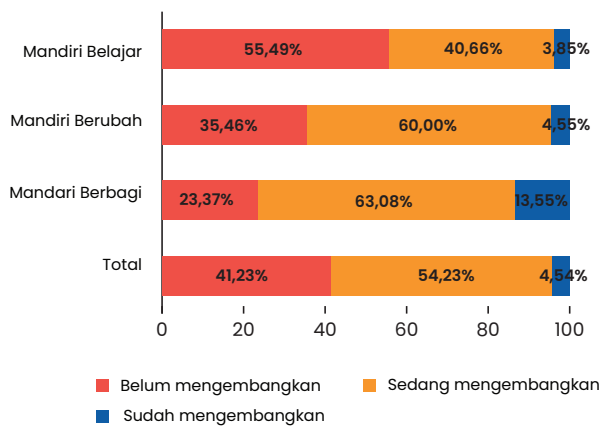
**Pemahaman Satpen terhadap Pengembangan KOSP, Pembelajaran dan Asesmen, dan 5 (n=32.557)**



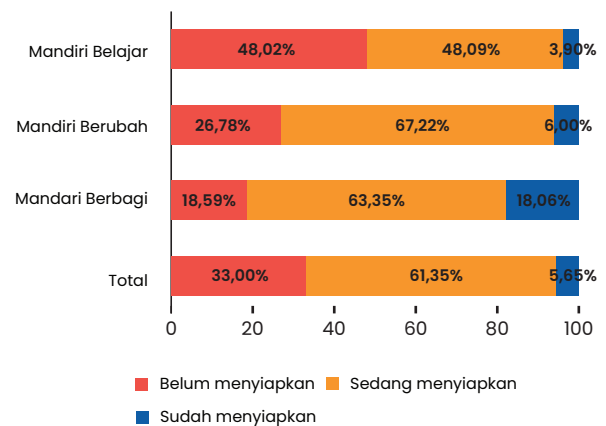
**Grafik 2** Pemahaman Satuan Pendidikan terhadap Pengembangan KOSP, Pembelajaran dan Asesmen, dan P5

Meskipun lebih dari separuh kepala satuan pendidikan telah memiliki tiga panduan kurikulum yang disediakan, sebagian besar dari mereka belum memahami ketiganya. Hanya sekitar 16,9% kepala satuan pendidikan yang mengaku paham bagaimana mengembangkan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), pembelajaran dan asesmen, maupun Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila/P5 (Grafik 2). Kendati pemahaman satuan pendidikan masih rendah, tetapi sebagian satuan pendidikan sudah berupaya menyiapkan berbagai dokumen perencanaan implementasi Kurikulum Merdeka, seperti Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), alur tujuan pembelajaran (ATP), dan modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (Grafik 3, 4, dan 5). Pengembangan KOSP, penyusunan ATP, dan pengembangan modul P5 yang dilakukan satuan pendidikan, selaras dengan kategori kesiapan implementasinya, di mana kategori Mandiri Berbagi relatif lebih siap dalam hal pengembangan dan penyusunan perencanaan implementasi kurikulum dibandingkan dua kategori lainnya (Grafik 3, 4, dan 5).

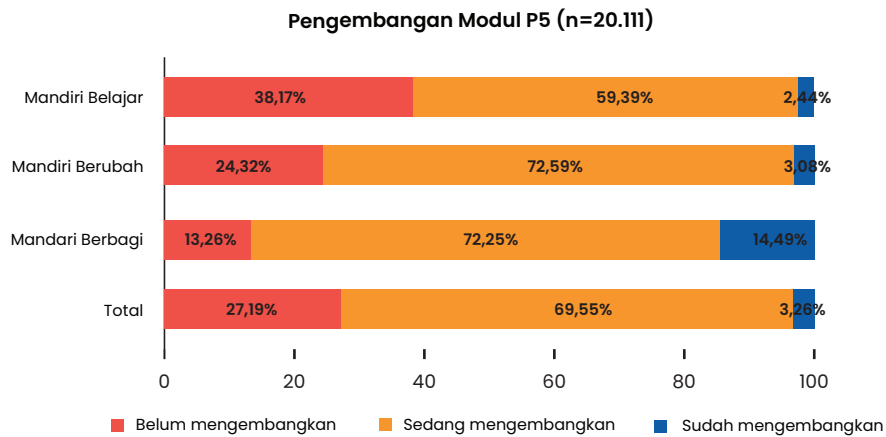
**Pengembangan KOSP menurut Kategori Jalur IKM (n=32.557)**



**Penyiapan Alur Tujuan Pembelajaran (n=32.557)**



**Grafik 3 dan 4** Pengembangan KOSP dan Penyiapan Alur Tujuan Pembelajaran menurut Kategori Jalur



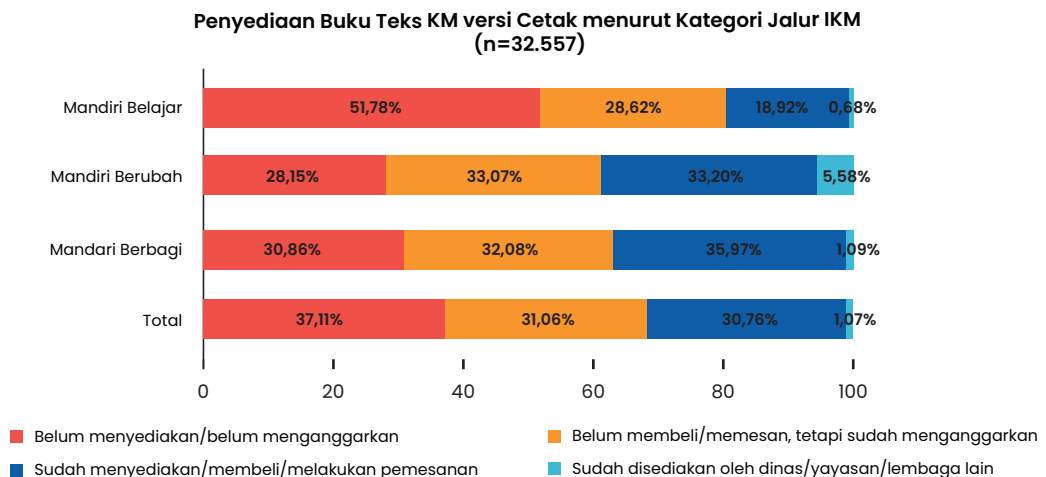
Grafik 5 Pengembangan Modul P5 menurut Kategori Jalur

Temuan di atas mengindikasikan dua hal. *Pertama*, meskipun pemahaman mengenai panduan kurikulum belum baik, namun tuntutan untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan kurikulum cukup mendesak karena tahun ajaran baru 2021/2022 segera dimulai. *Kedua*, rendahnya pemahaman terhadap panduan implementasi kurikulum dapat berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan kurikulum yang tidak sesuai dengan tujuan dari implementasi Kurikulum Merdeka. Indikasi kedua ini diperkuat dengan temuan survei berikutnya di bulan Agustus 2022 (survei implementasi awal), di mana terdapat sekitar 58,5% satuan pendidikan belum menerapkan asesmen awal pembelajaran.

**Temuan #2: Satuan pendidikan telah berupaya memenuhi ketersediaan buku teks Kurikulum Merdeka, tetapi rasio kecukupannya belum terpenuhi.**

Karakteristik Kurikulum Merdeka adalah mengedepankan keleluasaan satuan pendidikan dan guru untuk mengembangkan kurikulum serta perangkat ajar secara mandiri dan partisipatif (Anggreana, dkk., 2022b), salah satunya terkait dengan penyediaan buku teks Kurikulum Merdeka. Penyediaan buku teks Kurikulum Merdeka dilakukan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan, baik melalui pembelian buku teks cetak melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah), ataupun dengan memanfaatkan buku teks digital.

Hasil refleksi menunjukkan sebagian besar satuan pendidikan telah berupaya menyediakan buku teks cetak Kurikulum Merdeka, namun masih ada sekitar 37,11% sekolah yang belum menyediakan/menganggarkan (Grafik 6). Meskipun begitu, penyediaan buku yang dilakukan satuan pendidikan sebagian besar (53,95%) belum memenuhi rasio kecukupan untuk siswa.



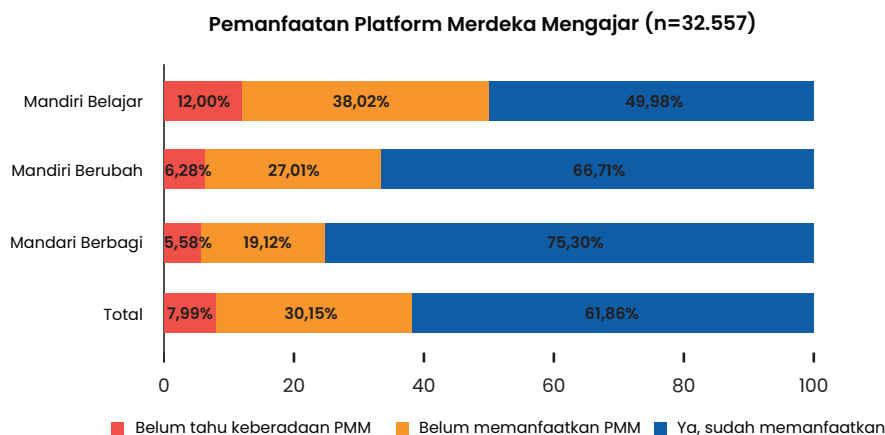
Grafik 6 Penyediaan Buku Teks Kurikulum Merdeka

Setidaknya terdapat dua alasan mengapa sebagian sekolah belum menyediakan buku teks Kurikulum Merdeka. *Pertama*, informasi mengenai buku teks Kurikulum Merdeka belum begitu dipahami. Survei PSKP pada Juni 2022 menunjukkan, 56,67% kepala satuan pendidikan masih belum mengetahui kebutuhan buku teks yang nantinya digunakan untuk implementasi Kurikulum Merdeka (PSKP, 2022). *Kedua*, Satuan pendidikan umumnya belum menganggarkan pembelian buku teks Kurikulum Merdeka dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Untuk mengatasi pemenuhan buku teks tersebut, beberapa satuan pendidikan berencana mengoptimalkan pemanfaatan buku digital, serta meminta guru dan siswa menyediakan buku yang dibutuhkan secara mandiri.

**Temuan #3: Kepala satuan pendidikan telah mengakses strategi dukungan yang telah disediakan, khususnya PMM dan seri webinar Kurikulum Merdeka. Namun, pemanfaatan strategi dukungan masih rendah jika dilihat dari jumlah materi yang diikuti.**

Dalam mendorong implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan, Kemendikbudristek menyediakan beberapa strategi dukungan, khususnya terkait dengan penguatan kapasitas diri kepala sekolah maupun guru, dua di antaranya yaitu Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan seri webinar implementasi Kurikulum Merdeka.

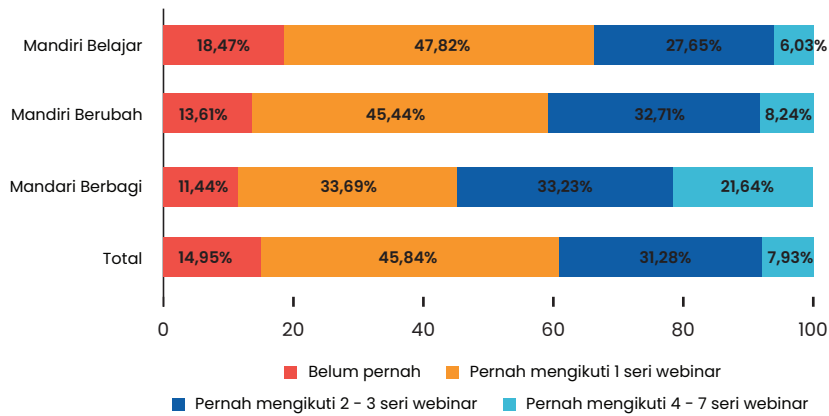
Data hasil refleksi kesiapan menunjukkan, sebanyak 61,86% satuan pendidikan sudah memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (Grafik 7). Selebihnya, sekitar 38,14% satuan pendidikan belum memanfaatkan atau belum mengetahui adanya PMM. Meskipun begitu, satuan pendidikan yang mengikuti pelatihan mandiri yang disediakan dalam Platform Merdeka Mengajar masih rendah dan berada di bawah 50%. Baru 43,40% satuan pendidikan yang mengikuti pelatihan mandiri topik “Kurikulum” dan 37,07% untuk topik “Perencanaan Pembelajaran” sampai tahap *post-test*. Beberapa hal menjadi penyebab mengapa kepala satuan pendidikan tidak mengikuti pelatihan mandiri yang tersedia di PMM, seperti sibuk dengan tugas lain, tidak terbiasa belajar mandiri, atau sudah mengikuti pelatihan tentang Kurikulum Merdeka melalui sumber di luar PMM.



**Grafik 7** Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar

Selain memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar, sebagian besar kepala satuan pendidikan juga mengaku pernah mengikuti seri webinar implementasi Kurikulum Merdeka dengan intensitas berbeda. Sejumlah 45,84% mengikuti 1 seri webinar, 31,28% mengikuti 2-3 seri webinar, dan 7,93% mengikuti 4-7 seri webinar (Grafik 8). Jadi, Sebagian besar kepala satuan pendidikan (77,12%) kepala satuan pendidikan baru menyaksikan 1-3 seri webinar yang ada. Jika dilihat berdasarkan status level kesiapan implementasinya, intensitas pemanfaatan seri webinar ini menunjukkan hasil yang konsisten. Satuan pendidikan dengan kategori Mandiri Berbagi lebih banyak menyaksikan seri webinar, lalu diikuti Mandiri Berubah dan Mandiri Belajar. Persepsi terhadap seri webinar juga cukup positif, di mana sejumlah 57,24% satuan pendidikan menganggap seri webinar sebagai sumber belajar yang membantu mereka memahami Kurikulum Merdeka.

Kepsek Mengikuti Webinar Series Kurikulum Merdeka (n=26.516)



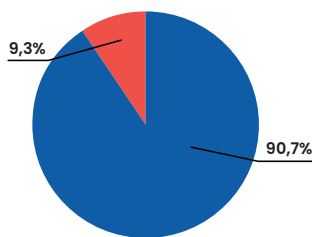
Grafik 8 Keikutsertaan Kepala Satuan Pendidikan dalam Seri Webinar Kurikulum Merdeka

**Temuan 4#: Sebagian besar kepala satuan pendidikan tergabung dalam komunitas belajar dan komunitas tersebut memiliki aktivitas yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.**

Berbagai studi menunjukkan, komunitas belajar berpotensi besar dalam meningkatkan kompetensi guru ataupun kepala sekolah (Benziane, 2013; Foltos, 2018; Cochrane-Smith & Lytle, 1999). Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas belajar menjadi inti dalam strategi implementasi Kurikulum Merdeka yang disediakan oleh pemerintah. Komunitas belajar diharapkan dapat dioptimalkan perannya agar dimanfaatkan sebagai media saling belajar guru dan kepala sekolah yang efektif.

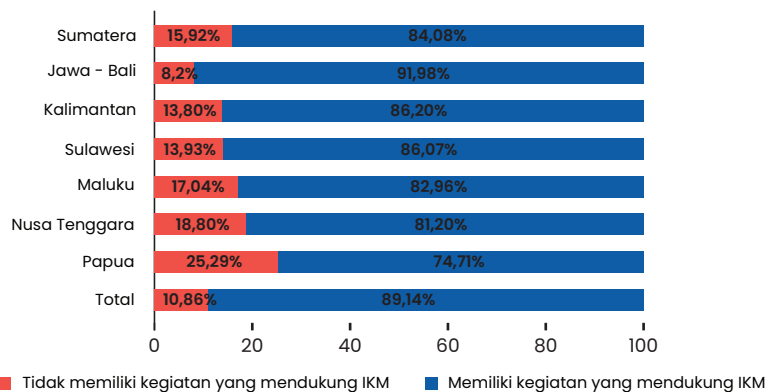
Hasil refleksi menunjukkan, sekitar 90,72% kepala sekolah tergabung dalam komunitas belajar (Grafik 9). Sebagian besar komunitas belajar juga memiliki kegiatan-kegiatan yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Berdasarkan wilayah, komunitas belajar di Jawa-Bali memiliki kegiatan yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka paling banyak dibandingkan wilayah lain. Sementara itu, komunitas belajar dengan kegiatan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka yang paling rendah terdapat di Papua (Grafik 10).

Kepsek Tergabung dalam Komunitas Belajar (n=32.557)



Grafik 9 Kepala Satuan Pendidikan Tergabung dalam Komunitas Belajar

Aktivitas Komunitas Belajar untuk Mendukung IKM (n=29.537)

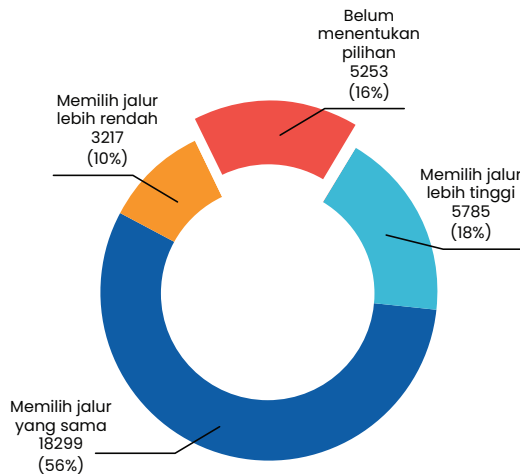


Grafik 10 Aktivitas Komunitas Belajar untuk Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka

Berbagai kegiatan dilakukan di dalam komunitas belajar. Beberapa di antaranya adalah pelatihan persiapan implementasi Kurikulum Merdeka (81,34%), diskusi/refleksi kesiapan sekolah (81,47%), kegiatan berbagi praktik baik (53,26%), serta pendampingan oleh rekan sejawat (51,92%). Pada beberapa komunitas belajar, guru dan satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan juga melakukan pendampingan dan aktivitas berbagi praktik baik pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari kegiatan pengimbasan mereka.

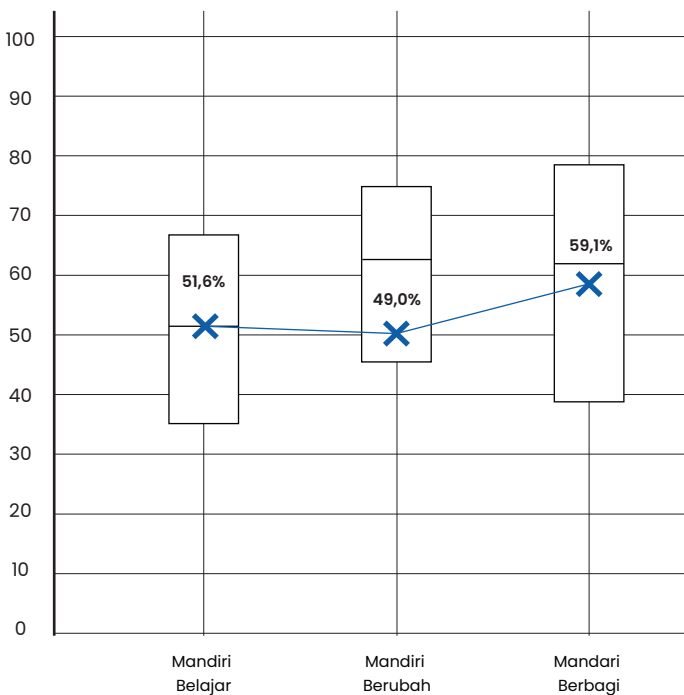
**Temuan 5#: Berdasarkan hasil refleksi kesiapan, hanya 28% kepala satuan pendidikan yang mengubah pilihan level kesiapannya. Perubahan tersebut makin sesuai dengan level kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.**

Dari 32.557 satuan pendidikan yang mengikuti refleksi kesiapan, 56% kepala satuan pendidikan memilih tetap berada di level kesiapan implementasi yang sudah dipilih pada saat pendaftaran, 28% kepala satuan pendidikan yang mengganti pilihannya, dan 16% lainnya belum menentukan pilihan (Grafik 11). Hasil analisis terhadap sebaran nilai hasil refleksi kesiapan di awal pendaftaran dan perubahan setelah mengisi instrumen refleksi kesiapan menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan satuan pendidikan makin sesuai dengan level kesiapan mereka (Grafik 12). Artinya, tingkat kesiapan satuan pendidikan lebih sejalan dengan kategori jalur yang dipilih, mulai dari Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi.

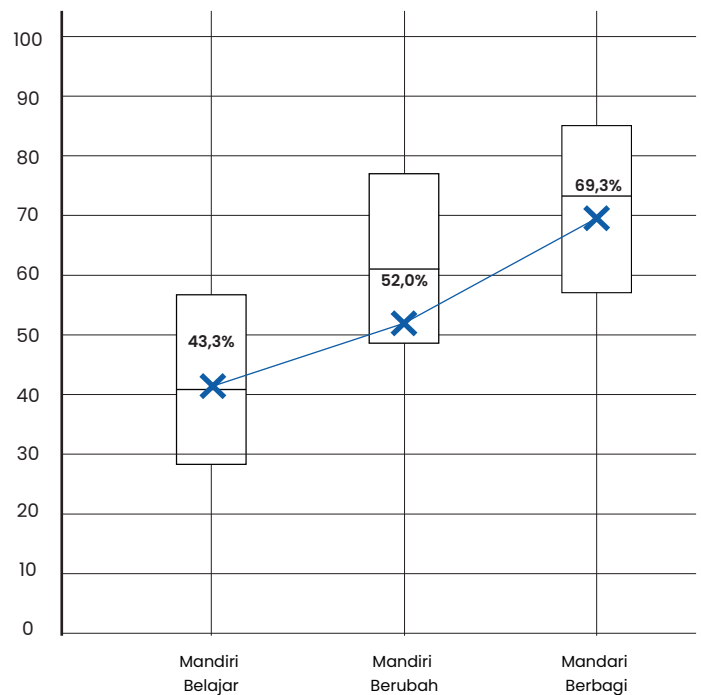


Grafik 11 Pilihan Satuan Pendidikan berdasarkan Hasil Refleksi

Sebaran Nilai Refleksi menurut Pilihan Awal Jalur IKM



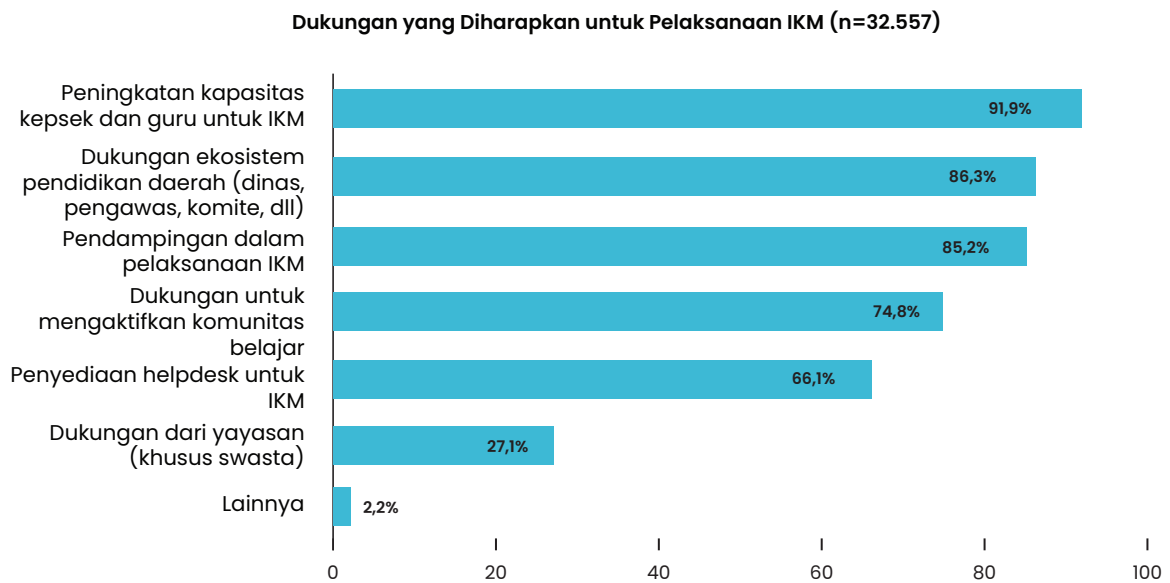
Sebaran Nilai Refleksi menurut Pilihan Perubahan Jalur IKM



Grafik 12 Sebaran Nilai Hasil Refleksi Kesiapan menurut Pilihan Awal Jalur IKM dan Perubahan Setelah Melakukan Refleksi



Hasil refleksi kesiapan ini juga mendapatkan masukan terkait dukungan yang diperlukan oleh satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Sebagian besar kepala sekolah menganggap dukungan peningkatan kapasitas dan dukungan dari ekosistem pendidikan di daerah penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Hasil refleksi kesiapan menunjukkan, sebagian besar kepala sekolah menganggap Kurikulum Merdeka sulit diimplementasikan jika tidak didukung oleh kebijakan atau aktivitas lain. Kepala satuan pendidikan mengharapkan berbagai dukungan dalam mendorong pelaksanaan Kurikulum di daerah, seperti dukungan peningkatan kapasitas, dukungan dari ekosistem pendidikan di daerah pendampingan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, dukungan untuk mengaktifkan komunitas belajar dan penyediaan pusat layanan bantuan di daerah (Grafik 13).



**Grafik 13** Dukungan yang diharapkan untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka

## Rekomendasi

Hasil refleksi menunjukkan bahwa kategori implementasi Kurikulum Merdeka cenderung mengikuti level kesiapan setiap satuan pendidikan. Namun demikian, perlu berbagai upaya untuk membantu satuan pendidikan agar pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan optimal.

### 1. Penguatan pemahaman terkait perencanaan dan pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka.

Pemahaman mengenai perencanaan dan pelaksanaan kurikulum merupakan kunci agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Aspek perencanaan meliputi penyusunan dan pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, alur tujuan pembelajaran, dan modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sementara aspek pelaksanaan setidaknya meliputi pelaksanaan asesmen awal pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi. Penguatan yang dimaksud dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber belajar yang disediakan Kemendikbudristek, yaitu PMM dan seri webinar, serta mengaktifkan komunitas belajar sebagai ruang untuk berdiskusi dan berbagi dalam merencanakan dan merefleksikan implementasi Kurikulum Merdeka.

### 2. Memastikan satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan rasio buku per siswa.

Salah satu bahan ajar kunci dalam pembelajaran materi kurikulum di dalam kelas adalah buku teks, sehingga pemenuhannya untuk setiap siswa menjadi keharusan dan ditegaskan dalam UU Sistem Perbukuan. Namun, sebagian sekolah belum memahami kebutuhan buku teks Kurikulum Merdeka dan belum memasukkan belanja buku teks Kurikulum Merdeka ke dalam perencanaan sekolah. Untuk itu, *pertama*, perlu menyosialisasikan kebutuhan buku teks Kurikulum Merdeka sesuai jenjang dan jenis pendidikan. *Kedua*, mendorong dinas pendidikan untuk memastikan setiap sekolah telah menganggarkan pembelian buku teks Kurikulum Merdeka. *Ketiga*, buku teks versi digital dapat menjadi alternatif apabila sekolah belum menyediakan buku teks Kurikulum Merdeka.

### 3. Pemanfaatan sumber-sumber belajar mandiri, seperti PMM dan seri webinar perlu ditingkatkan.

Akses terhadap PMM dan seri webinar relatif meningkat apabila dibandingkan di masa awal pendaftaran pelaksana Kurikulum Merdeka jalur mandiri. Namun, akses terhadap PMM dan seri webinar tersebut belum fokus pada pembelajaran mandiri untuk memahami konsep, panduan, dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Hal itu terlihat dari rendahnya keikutsertaan satuan pendidikan yang mengakses topik-topik kunci dalam PMM, serta jumlah seri webinar yang diikuti. Oleh karena itu, *pertama*, akses terhadap PMM dan seri webinar perlu diarahkan untuk memperdalam topik-topik yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. *Kedua*, memperbanyak topik yang diperlukan oleh kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, terutama materi implementasi yang lebih teknis dan operasional. Topik-topik yang dimaksud dapat berangkat dari kesulitan-kesulitan umum yang dihadapi oleh kepala sekolah dan guru ketika menerapkan Kurikulum Merdeka.

### 4. Mengoptimalkan aktivitas dan peran komunitas belajar dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka

Keaktifan satuan pendidikan dalam komunitas belajar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Namun, pemerintah dan pemerintah daerah (dinas pendidikan) perlu memberi perhatian lebih kepada daerah yang belum banyak memiliki komunitas atau komunitasnya tidak aktif. Hal ini penting karena komunitas belajar memiliki potensi sebagai media belajar bagi kepala satuan pendidikan dan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan menumbuhkan kebiasaan belajar secara mandiri.

**5. Kemendikbudristek dan UPT perlu memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah terkait pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka di daerah.**

Pemetaan kondisi satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka perlu dilakukan bersama antara UPT Kemendikbud dan dinas pendidikan agar pelatihan dan pendampingan yang dilakukan dapat fokus membantu satuan pendidikan yang kesulitan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Hasil refleksi kesiapan ini menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah berharap agar mereka mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas dan pendampingan, dukungan untuk mengaktifkan komunitas belajar, serta penyediaan pusat layanan bantuan (*helpdesk*) di daerah.

**6. Refleksi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan kurikulum berjalan baik dan persoalan di lapangan dapat segera diatasi.**

Refleksi yang dimaksud dapat dilakukan melalui instrumen asesmen mandiri maupun refleksi berkala antara UPT Kemendikbud dengan dinas pendidikan. Melalui refleksi tersebut diharapkan berbagai persoalan yang muncul dapat segera diatasi.

## Daftar Pustaka

- Anggraena, Yogi., dkk. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek.
- Anggraena, Yogi., dkk. (2022). *Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek.
- Benziane, Amy. (2013). *The Potential of Teacher Learning Communities in Education*. <https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/the-potential-of-teacher-learning-communities-in-education>.
- Cochrane-Smith, M. & Lytle, S. (1999). *Relationships of knowledge and practice: Teacher learning in communities. Review of Research in Education*.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terj.). Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M.D. (2021). Learning loss due to school closures during the Covid-19 pandemic. PNAS. Vol. 118 No.17 DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2022376118>
- Foltos, Les. (2018). *Teachers Learn Better Together*. <https://www.edutopia.org/article/teachers-learn-better-together>
- Jandrić, P., & McLaren, P. (2021). From learning loss to learning opportunity, educational philosophy and theory. Educational Philosophy and Theory. DOI: 10.1080/00131857.2021.2010544
- Li ,Y., Zhang, X., Dai, D.Y., & Hu, W. (2021). Curriculum innovation in times of the COVID-19 pandemic: The thinking-based instruction theory and its application. Front. Psychol. 12:601607.doi: 10.3389/fpsyg.2021.601607
- Merdeka Belajar Episode Kelima Belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar*. Paparan Mendikbudristek dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode Kelima Belas, 11 Februari 2022.
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. (2022a). *Survei Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Analisis Media Online dan Media Sosial*. Bahan paparan hasil studi pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka dan analisis media, tanggal 7 Maret 2022.
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. (2022b). *Belanja BOS/BOP Reguler untuk Memenuhi Kebutuhan Buku Kurikulum Merdeka*. Bahan paparan hasil studi BOS/BOP Reguler untuk Memenuhi Kebutuhan Buku Kurikulum Merdeka, 20 Juni 2022.
- Tim Penyusun Pusat Penelitian Kebijakan & INOVASI. *Dampak Penyederhanaan Kurikulum Terhadap Capaian Pembelajaran: Belajar dari Penerapan Kurikulum Darurat di Masa Pandemi COVID-19*. Risalah Kebijakan Nomor 29, November 2021. Pusat Penelitian Kebijakan, Kemendikbudristek.

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
**Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**  
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-5736365, 5713827



Tim Penyusun

Lukman Solihin  
Diyan Nur Rakhmah  
Imelda Widjaja  
Tito Erland Setyadi  
Saiful Bari  
Maimun Rizal